



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NAMA SOP

PENYUSUNAN RKA SKPD - PPKD

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Nomor SOP

SOP/ 22 /BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Renja
2. SOP Penyusunan KUA
3. SOP Penyusunan PPAS

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses penyusunan DPA-SKPD

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah
2. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan RKA SKPD

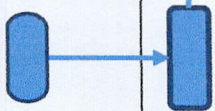
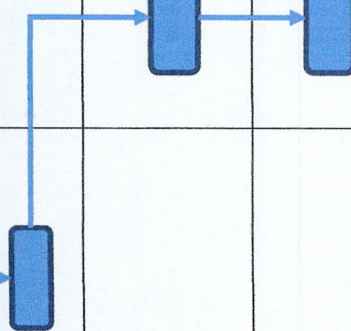
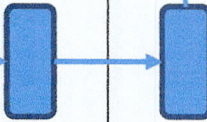

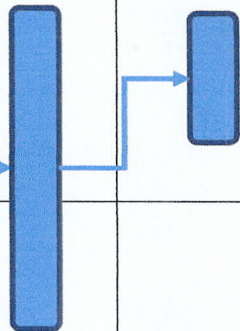
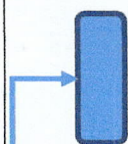
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer, scanner
3. Internet
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENYUSUNAN RKA SKPD - PPKD

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPKD	SKPD	TAPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPKD membuat Surat Pemberitahuan Pedoman Penyusunan RKA berdasarkan Nota Kesepahaman KDH dengan DPRD tentang KUA dan PPAS				Nota Kesepahaman		Surat Pemberitahuan	
2.	PPKD menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada SKPD				Surat Pemberitahuan		-	
3.	SKPD menyusun Rancangan RKA-SKPD berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Pedoman Penyusunan RKA				Surat Pemberitahuan, Pedoman Penyusunan RKA		Rancangan RKA-SKPD	
4.	SKPD menyerahkan Rancangan RKA-SKPD kepada PPKD untuk dibahas TAPD				Rancangan RKA-SKPD		Rancangan RKA-SKPD	
5.	TAPD melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD bersama kepala SKPD, berdasarkan KUA-PPAS				Rancangan RKA-SKPD		Rancangan RKA-SKPD hasil verifikasi	
6.	TAPD menyerahkan hasil verifikasi Rancangan RKA-SKPD kepada PPKD untuk dijadikan bahan penyusunan RAPBD				Rancangan RKA-SKPD hasil verifikasi		Rancangan RKA-SKPD hasil verifikasi	